

**STUDI KOMPARASI PELAKSANAAN INDIKASI GEOGRAFIS PASCA
SERTIFIKASI OLEH MASYARAKAT PERLINDUNGAN INDIKASI
GEOGRAFIS (MPIG) DALAM RANGKA KEMAJUAN EKONOMI
MASYARAKAT**

(Studi Kasus : Di Kabupaten Kepulauan Meranti dan Kota Solok)

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk memperoleh Gelar Magister Hukum (MH)



Oleh:

Monarisya Rialin
2120112007

Dosen Pembimbing :

Prof. Dr. Zainul Daulay, S.H., M.H

Dr. Delfiyanti, S.H., M.H

PROGRAM PASCA SARJANA

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

TAHUN 2023

**STUDI KOMPARASI PELAKSANAAN INDIKASI GEOGRAFIS PASCA
SERTIFIKASI OLEH MASYARAKAT PERLINDUNGAN INDIKASI
GEOGRAFIS (MPIG) DALAM RANGKA KEMAJUAN EKONOMI
MASYARAKAT (Studi kasus : Di Kabupaten Kepulauan Meranti dan Kota
Solok)**

Monarisya Rialin, 2120112007, Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Andalas, Tahun 2023.

ABSTRAK

Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan. Indikasi Geografis pada produk diklaim sebagai produk premium dan dapat meningkatkan ekonomi jika digunakan dan dilindungi dengan baik. Namun, tidak semua produk Indikasi Geografis terdaftar mengalami kenaikan harga secara signifikan pasca sertifikasi seperti Sagu Meranti. Oleh karena itu peran dari Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis dalam tata kelola pasca sertifikasi sangat penting dan berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan anggotanya. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana pengaturan perlindungan Indikasi Geografis dalam pengaturan hukum Internasional dan Nasional?, 2. Bagaimana pelaksanaan Indikasi Geografis oleh Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) pada Daerah Kepulauan Meranti dan Daerah Solok?. 3. Bagaimana model alternatif tata kelola Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis yang dapat digunakan oleh Asosiasi Masyarakat Sagu Meranti (AMSM) dalam rangka memajukan Indikasi Geografis daerah?. Penelitian ini merupakan penelitian normatif-empiris melalui pendekatan komparasi dengan menggunakan data primer dan sekunder. Berdasarkan penelitian diperoleh hasil bahwa: Satu, Pengaturan perlindungan Indikasi Geografis secara Internasional diatur dalam Pasal 22-24 perjanjian *TRIPs* dan dalam hukum nasional diatur pada Pasal 53 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Dua, Pelaksanaan Indikasi Geografis oleh Asosiasi Masyarakat Sagu Meranti (AMSM) diketahui belum berjalan maksimal ditandai dengan tidak digunakannya logo Indikasi Geografis dalam kemasan produknya yang menyebabkan belum terjadinya peningkatan harga produk Sagu, sebaliknya pada MPIG Kopi Liberika Rangsang Meranti dan Barih Solok justru mengalami peningkatan hasil produksi dan kenaikan harga sehingga berdampak pada peningkatan pendapatan anggotanya. Tiga, Model alternatif yang digunakan bagi AMSM berupa a. Penguatan rantai nilai Indikasi Geografis, Pemerintah Kepulauan Meranti dapat membentuk kebijakan hukum yang mendorong peningkatan Indikasi Geografis, b. Pengelolaan kualitas dan karakteristik melalui pengembangan panduan kontrol internal, dan 3. Metode pemasaran melalui penggunaan logo Indikasi Geografis pada kemasan produk dan kerjasama dengan pihak swasta maupun Pemerintah.

Kata Kunci : Studi Komparasi, Indikasi Geografis, MPIG, Kemajuan Ekonomi, Kepulauan Meranti dan Kota Solok.

**COMPARATIVE STUDY OF THE IMPLEMENTATION OF
GEOGRAPHICAL INDICATION POST CERTIFICATION BY
GEOGRAPHICAL INDICATION PROTECTION COMMUNITY (GIPC) FOR
COMMUNITY ECONOMIC PROGRESS (Case study: In Meranti Island and
Solok City)**

Monarisya Rialin, 2120112007, *Master of Law Faculty Of Law Andalas
University, 2023.*

ABSTRACT

Geographical Indication is a sign indicating the area of origin of goods and/or products which due to geographic environmental factors including natural factors, human factors or a combination of the two factors give reputation, quality and certain characteristics to the goods or products produced. Geographical Indications on products are claimed as premium products that can increase revenue if used and protected properly. However, not all registered Geographical Indications products significant price increases after certification, such as Sago Meranti. Therefore the role of Geographical Indication Protection Society (GIPS) in post-certification good governance is very important and influences the improvement of the welfare of its members. The formulation of the problem in this research is:1.How is the protection of Geographical Indications regulated in international law and national law?,2.How is the implementation of Geographical Indications by the Geographical Indication Protection Society in the Meranti Islands and Solok? 3.What is the alternative model of the Community for the Protection of Geographical Indications that can be used by the Community Association of Sago Meranti in order to advance regional Geographical Indications? This research is a normative-empirical research through a comparative approach. Based on the research, the results were obtained that:1.International Geographical Indications protection arrangements are regulated in the TRIPs agreement Articles 22-24 and in national law regulated in Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications Article53.2.Geographical Indications implementation by the Community Association of Sago Meranti is known has not run optimally as indicated by the absence of the Geographical Indication logo on its product packaging which has resulted in no increase in the price of Sago products, on the other hand Geographical Indication Protection Society Kopi Liberika Rangsang Meranti and Bareh Solok have experienced an increase in production yields and an increase in prices which has an impact on increasing the income of its members.3.Alternative models used for the Community Association of Sago Meranti are a.Strengthening the Geographical Indications value chain, Meranti Islands Government can establish legal policies of Geographical Indications, b.Management of quality and characteristics through the development of internal control guidelines, and c. marketing methods through the use of the Geographical Indications logo on packaging and collaboration with the private sector and the government.

Keywords : Comparative Study, Geographical Indication, GIPS, Economic Progress, Meranti Islands Region and Solok Region.

